



PEMERINTAH KOTA BOGOR

KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RINGKASAN

PERENCANAAN INDUK PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* PEMERINTAH KOTA BOGOR 2014 - 2018

(C) Pemerintah Kota Bogor 2013

Kerjasama antara kantor Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bogor
dengan Balai IPTEKnet Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
BAB 1. Pendahuluan	3
1.1. Kota Bogor.....	3
1.2. Implementasi e-Government.....	3
1.3. Dasar Hukum.....	4
BAB 2. Permasalahan.....	5
2.1. Permasalahan Umum.....	5
2.2. Kebijakan.....	5
2.3. Kelembagaan.....	5
2.4. Sarana Prasarana TIK.....	6
2.5. Aplikasi.....	6
2.6. Perencanaan.....	6
BAB 3. Solusi.....	7
3.1. Kerangka Pikir.....	7
3.2. Kebijakan.....	7
3.3. Kelembagaan.....	8
3.4. Sarana Prasarana TIK.....	8
3.5. Aplikasi.....	8
3.6. Perencanaan.....	9
BAB 4. Perencanaan Aksi.....	10
4.1. Peta Jalan.....	10
4.2. Rincian Kegiatan	11
BAB 5. Penutup.....	16

BAB 1. Pendahuluan

1.1. Kota Bogor

Perkembangan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan dampak yang sangat signifikan ke semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas, jarak, tempat, ruang dan waktu. Pengaruhnya pun meluas ke berbagai kehidupan, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, politik, pemerintahan, lingkungan hidup, inovasi serta komunikasi masyarakat dari berbagai disiplin ilmu, budaya, umur, agama. Hampir setiap manusia di jagad ini telah berkomunikasi menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan semua perangkat TIK yang tersedia mudah dan murah di pasaran.

Di semua wilayah di jagad ini, pemerintahan yang modern telah menempatkan peran teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana kerja utama, bukan hanya sebagai support akan tetapi sudah sejalan senafas dan bahkan sebagai motor penggerak roda pemerintahan, manfaat TIK bukan hanya sebagai alat pengganti baca-tulis-hitung dari tradisional menjadi digital, akan tetapi sudah merambah sebagai bagian dari alat bantu pengambilan keputusan.

Kota Bogor sebagai kota modern yang sudah terbangun sejak ratusan tahun yang lalu selayaknya bisa menjadi kiblat pemanfaatan TIK untuk pemerintahan daerah di Indonesia. Kota Bogor tidak lagi melihat contoh pemanfaatannya di dalam negeri akan tetapi sudah mencontoh ke berbagai kota modern di seluruh dunia serta mengembangkannya sesuai kultur khas masyarakat kota Bogor serta kaidah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di Jawa barat dan Kota Bogor ini sendiri.

Dengan peningkatan Peran TIK yang sejalan Misi kota yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kota, maka bisa sangat diharapkan bahwa hasil yang akan didapatkannya akan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini bisa terlihat pada praktik terbaik dengan trend hasil pembangunan kota-kota seluruh dunia setelah inisiatif pengembangan *e-Government* lebih di tingkatkan dalam mengatur pemerintahannya.

1.2. Implementasi e-Government

E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK. *e-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

E-Government bukan hanya milik SKPD Kominfo akan tetapi merupakan urusan bersama seluruh SKPD dimana dalam melaksanakan implelementasi *e-Government* perlu dilakukan

RINGKASAN RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMKOT BOGOR 2014 - 2018

perencanaan yang komprehensif yang melibatkan seluruh komponen pemerintah kota, layanan system yang menjangkau ke seluruh tatakelola / birokrasi pemerintahan, sehingga seluruh komponen pemerintah kota mau tidak mau siap tidak siap, semua akan terlibat langsung dalam implementasinya.

Tujuan dari implementasi pengembangan *e-Government* adalah untuk memudahkan warga kota untuk mendapatkan pelayanan publik dan berinteraksi dengan pemerintah kota; memperbaiki kepekaan dan respon pemerintah kota terhadap kebutuhan warga; meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

Implementasi pengembangan *e-government* dalam rangka menuju pemerintahan yang baik dan benar, bukan lagi sebagai inisiatif coba-coba yang hanya ingin mendapatkan award dari institusi pemeringkatan kematangan implementasi, akan tetapi sudah menjadi bagian dari tuntutan masyarakat, kalaziman jaman serta amanah nasional. Kajian pemeringkatan hanya digunakan sebagai umpan balik yang selanjutnya digunakan untuk mengejar keteringgalan dan memonitor arah implementasinya.

1.3. Dasar Hukum

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*
5. Perpres No. 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
6. KepmenPAN 63 th 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Edaran KepmenPAN tentang 9 (sembilan) langkah Reformasi Birokrasi

BAB 2. Permasalahan

2.1. Permasalahan Umum

1. Menurunnya hasil pemeringkatan e-Government dari tahun 2010 s/d 2012
2. Belum banyak dipahaminya bahwa pengembangan e-Government adalah dilakukan oleh dan untuk seluruh komponen pemerintah kota
3. Masih banyaknya proses birokrasi di SKPD yang belum diotomatisasikan

2.2. Kebijakan

1. Belum banyak dikeluarkan regulasi dalam bentuk perwali tentang kebijakan, prosedur operasional standar sebagai pedoman implementasi e-government untuk semua SKPD dan komponen pemerintah kota
2. Adanya SKPD yang membangun sendiri infrastruktur dan aplikasinya tanpa berkoordinasi dengan Kominfo. Kondisi ini beresiko pada terjadinya in efisiensi pengelolaan anggaran dan sistem pengamanan informasi.
3. Belum banyak dipahaminya bahwa seluruh aset informasi yang dikelola pemerintah kota melalui SKPD harus bisa dimanfaatkan juga oleh SKPD lain sesuai kebutuhan. Setiap komponen pemerintah kota wajib menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data milik pemerintah kota.
4. Tujuan e-government adalah efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik untuk itu seluruh pengembangan dan pengelolaannya harus terintegrasi dalam satu koordinasi, untuk itu setiap pengelolaan TIK pemerintah kota selayaknya mengacu ke standar yang telah ditentukan dan perlu dilakukan audit secara berkala untuk memastikan kelayakan dan kehandalan implementasinya

2.3. Kelembagaan

1. Tugas pokok dan Fungsi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan TIK telah dibebankan sepenuhnya ke Kantor Kominfo, akan tetapi tidak semua permasalahan TIK mampu ditangani oleh SKPD ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya dan kewenangannya
2. Cukup banyaknya SDM yang berlatar belakang pendidikan TIK akan tetapi tidak didayagunakan untuk pengembangan e-Government secara optimal, sementara banyak sekali fungsi pengelolaan TIK baik di Kantor Kominfo maupun di SKPD yang membutuhkan penanganan SDM TIK.
3. Belum banyaknya kesempatan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan SDM pengelola TIK.

2.4. Sarana Prasarana TIK

1. Belum memiliki kelengkapan sarana prasarana TIK diantaranya Datacenter, Data recovery center, pusat operasional jaringan, perangkat pengamanan informasi
2. Media transmisi jaringan sudah sangat baik yang meng-koneksikan seluruh SKPD sampai dengan kelurahan, ada perencanaan sambungan fiber optik ke seluruh SKPD. Akan tetapi saat ini media transmisi yang tergelar masih menyatu dengan milik pihak ketiga dan bukan milik murni pemerintah kota, kedepan perlu dipertimbangkan sisi keamanan informasinya, sampai saat ini kapasitas kabel FO sudah mencukupi untuk melayani seluruh transaksi data pemerintah kota.
3. Media transmisi juga redundant dengan jaringan wireless, sehingga tingkat ketersediaanya sangat tinggi apabila selalu terpelihara dengan baik
4. Perangkat dan tatakelola keamanan informasi menjadi hal yang mutlak di implementasikan apabila seluruh sistem pemerintahan elektronik sudah berjalan dengan baik

2.5. Aplikasi

1. Setiap SKPD mempunyai layanan berdasarkan tupoksinya dan mempunyai data untuk diolah menjadi data / informasi baru akan tetapi masih banyak yang belum di otomatiskan. Pengembangan aplikasi masih banyak yang belum sesuai dengan cetak biru pengembangan aplikasi dari Kominfo
2. Website resmi pemerintah kota beserta subdomainnya sudah sangat baik di tahap ini, kedepan perlu ditingkatkan ke tahap transaksional dan pada akhirnya sampai ke tahap interoperabilitas. Perlu dipahami bahwa website pemerintah kota bukanlah sebagai media berita sebagaimana website detik.com dlsb. Website resmi pemerintah kota sebaiknya lebih menonjolkan layanan masyarakat dan diseminasi potensi daerah.

2.6. Perencanaan

1. Belum ada team perencanaan pengembangan TIK dan juga belum ada mekanisme perencanaan pengembangan TIK yang melibatkan seluruh komponen Pemerintah Kota
2. Belum ada perencanaan keberlanjutan system, sehingga jika terjadi masalah besar yang menyebabkan berhentinya sebagian besar atau seluruh layanan infrastruktur TIK, maka belum ada solusi yang cepat untuk merecovery keberlanjutan system

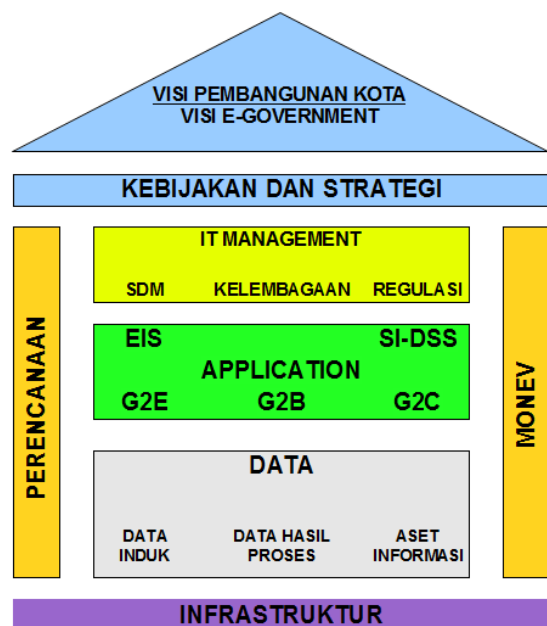
BAB 3. Solusi

3.1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir implementasi *e-Government* di pemerintah kota Bogor adalah dengan langkah sebagai berikut :

1. Pengembangan *e-Government* yang sejalan dengan misi pembangunan kota Bogor.
2. Penguatan kelembagaan dan kebijakan serta perencanaan *e-Government*;
3. Penguatan infrastruktur TIK dengan membangun Datacenter dan Data recovery Center; pemantapan jaringan internet milik pemerintah kota serta pengelolaan keamanan informasi.
4. Pengembangan layanan TIK terintegrasi dengan pengelolaan data / informasi milik pemerintah kota sebagai aset informasi yang bisa dikelola dan di manfaatkan bersama seluruh SKPD dengan mekanisme dan dasar hukum yang jelas. Pengembangan layanan internal birokrasi pemerintah kota, layanan masyarakat, dan layanan dunia usaha serta koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah vertikal dan horisontal
5. Pemanfaatan peran serta masyarakat dan pihak ketiga dalam mempercepat implementasi *e-Government* serta memastikan benarnya arah pengembangannya berdasarkan kaidah ilmu dan standar pengembangan dan pemanfaatan TIK.

Gambaran kerangka pikir pengembangan *e-Government* sebagai solusi atas kondisi terkini di pemerintah kota Bogor sebagaimana terlihat pada gambar disamping ini.



Rincian solusi implementasinya tersusun dalam format 5 (lima) dimensi penilaian pada dokumen pemeringkatan *e-Government* dari Kemenkominfo sebagai berikut :

3.2. Kebijakan

1. Penyusunan kelengkapan regulasi kebijakan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditetapkan melalui peraturan walikota diantaranya :

RINGKASAN RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMKOT BOGOR 2014 - 2018

1. Kelembagaan implementasi e-Government yang melibatkan seluruh komponen pemerintah kota serta penetapan visi dan misi pengembangan e-Government
2. Regulasi pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan data, sistem informasi dan sarana prasarana TIK pemerintah kota Bogor
3. Regulasi sistem pengamanan informasi
2. Penyusunan SOP pengelolaan data, sistem informasi dan sarana prasarana TIK

3.3. Kelembagaan

1. Pembentukan fungsi strategis pengelolaan e-Government
2. Restrukturisasi SKPD Kominfo
3. Reformasi pengelolaan sumber daya manusia bidang TIK seluruh SKPD

3.4. Sarana Prasarana TIK

1. Kesepakatan Jaminan layanan sebesar 99,5 %
2. Pembangunan Datacenter dan NOC dengan standar TIA 942 pada tingkat Tier 1
3. Pemanfaatan pihak ketiga untuk pengelolaan Data Recovery center
4. Penguatan jaringan internet untuk menjamin aksesabilitas seluruh layanan pemerintah kota
5. Pengelolaan keamanan informasi
6. Inventarisasi dan pengendalian pengadaan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana TIK

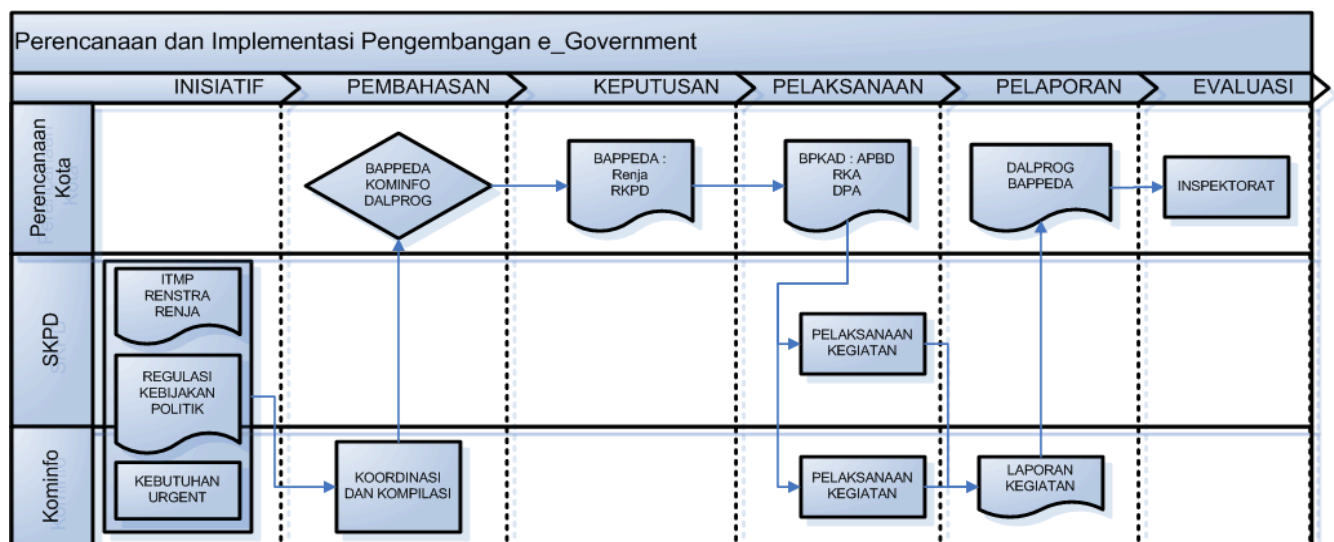
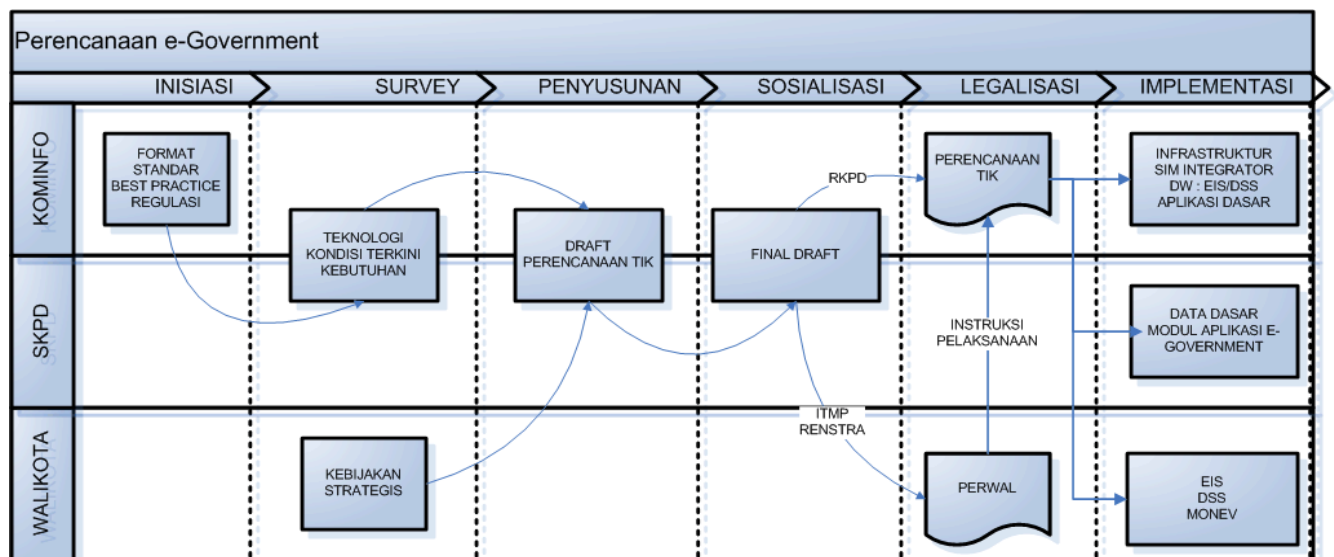
3.5. Aplikasi

1. Desain ulang website resmi beserta seluruh sub domainnya
2. Standardisasi metadata
3. Pengembangan aplikasi layanan utama e-Government sesuai visi pembangunan kota
4. Inventarisasi dan pengendalian pengadaan, pengelolaan dan pemanfaatan data dan sistem informasi

3.6. Perencanaan

1. Penetapan team perencanaan e-Government yang melibatkan seluruh komponen pemerintah kota
2. Perencanaan TIK untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan kota
3. Perencanaan keberlanjutan system

Mekanisme perencanaan



BAB 4. Perencanaan Aksi

4.1. Peta Jalan

Perencanaan Jangka Panjang

Dimensi	2009 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025
Kebijakan	Perwali implementasi e-Government SOP mekanisme pengembangan e-Government antar SKPD	SOP System informasi terintegrasi SOP Keamanan Informasi	Sertifikasi layanan TIK
Kelembagaan	Restrukturisasi Penguatan kebijakan SDM	Peningkatan jumlah dan kualitas SDM TIK	Peningkatan jumlah dan kualitas SDM TIK
Infrastruktur	Service level agreement 90 % Datacenter Jaringan FO SKPD Jaringan wireless s/d Kelurahan Uji Coba Cloud Computer	Service level agreement 95% Seluruh SKPD sudah terlayani Datacenter Terbangunnya sistem Data Recovery Center Jaringan FO s/d Kelurahan yg redundant dgn wireless Sistem keamanan informasi Penggantian perangkat	Service level agreement 99.99% Sertifikasi dan standardisasi pengembangan dan perawatan system Penggantian perangkat
Aplikasi	Terbangunnya 50% modul aplikasi e-Government Migrasi ke opensource Desain ulang website	Terbangunnya 100% modul aplikasi e-Government Terbangunnya 50% sistem informasi laporan eksekutif	Terbangunnya 100% sistem laporan eksekutif Terbangunnya 100% Decision Support System
Perencanaan	Penetapan ITMP 2014 – 2018 Perencanaan keberlanjutan system	Review berkala ITMP Review semua perencanaan	Penyusunan ITMP 2020 -2025 Review semua perencanaan

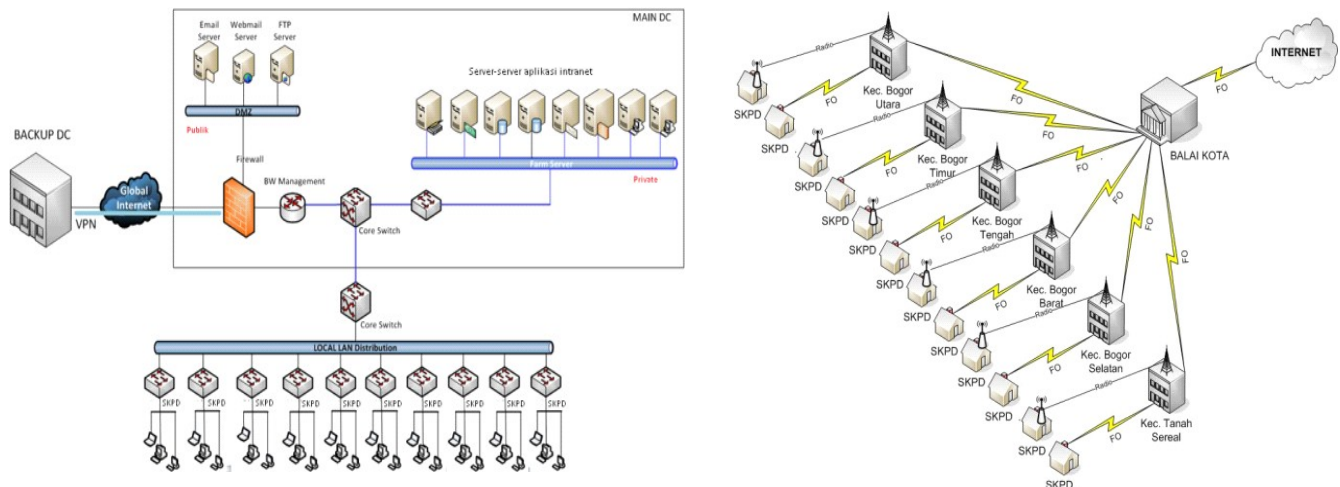
4.2. Rincian Kegiatan

Visi	Program	Kegiatan	Tahun	Hasil	Manfaat
Memperkuat tatakelola e-Government	Pengembangan kelembagaan TIK	Penyusunan regulasi dan SOP dengan penetapan Perwali	2014	Perwali kebijakan dan SOP implementasi e-Government	Petunjuk yang jelas pengembangan e-Government bagi seluruh komponen pemkot
		Restrukturisasi SKPD Kominfo	2015 - 2016	Struktur baru SKPD Kominfo	Optimalisasi kinerja SKPD Kominfo
		Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM TIK seluruh SKPD	2014 - 2018	Jumlah sertifikat, ketrampilan, jumlah SDM	Efektifitas layanan TIK pemerintah Kota
Mengembangkan infrastruktur TIK terpadu untuk	Pengembangan sarana dan prasarana TIK	Pembangunan Datacenter	2014 - 2015	Ruang Datacenter berstandar TIA 912	meningkatnya kinerja pemerintah dan layanan masyarakat berbasis TIK
		Pengembangan jaringan FO	2014 - 2015	Jumlah jaringan FO	Peningkatan akses jaringan internet
		Pengembangan layanan keamanan informasi	2016 - 2018	Sistem pengamanan informasi	Peningkatan keamanan informasi
Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan kota	Pengembangan sistem informasi e-Government	Standardisasi metadata Pembuatan repository data pemerintah kota	2014 - 2018	Standard data pemerintah kota	Memudahkan integrasi data antar seluruh SKPD
		Penuntasan pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen	2014 - 2018	SIM e-Government	Peningkatan layanan pemerintah kota

RINGKASAN RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMKOT BOGOR 2014 - 2018

		Pengembangan sistem informasi laporan eksekutif dan bantuan pengambilan keputusan	2016 - 2018	EIS dan DSS	Smart Government
		Pengembangan website pemerintah kota	2014	Website interaktif	Peningkatan layanan masyarakat
Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Peningkatan layanan informasi publik				

4.3 Cetak Biru Infrastruktur TIK



No	Jalur	Pengembangan
1	Bogor Selatan - Bawasda/Inspektorat	Mengganti Radio 2.4 GHz dari link Kec. Bogor Selatan dengan FO
2	Bawasda/Inspektorat - Kelurahan Empang	Mengganti Radio 5.8 GHz dari link Kec. Bogor Selatan dengan FO
3	Bawasda/Inspektorat - Kantor Ketahanan Pangan	Koneksi baru ke Kantor Ketahanan Pangan dengan FO
4	Ketahanan Pangan - Distani + Kelurahan Cipaku	Mengganti Radio 5.8 GHz dari link PD Pasar dengan FO

RINGKASAN RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMKOT BOGOR 2014 - 2018

5	Kesbang - Lingkungan Hidup + Dispora + Perpustakaan + GOR	Koneksi baru ke GOR dengan FO dari link Perpustakaan.
6	Dispenda - Disperindag	Mengganti Radio 5.8 GHz dari link Kec. Tanah Sareal dengan FO
7	Kecamatan Tanah Sareal - Kelurahan Kedung Badak	Mengganti Radio 5.8 GHz dari link Kec. Tanah Sareal dengan FO
8	Kelurahan Kedung Badak - Kelurahan Kedung Jaya	Koneksi baru Kel. Kedung Badak ke Kel. Kedung Jaya dengan FO.
9	Kelurahan Kedung Jaya - Mainhole Jalan Baru	Koneksi baru Kel. Kedung Jaya ke Mainhole Jalan Baru dengan FO.
10	Mainhole Jalan Baru - Kelurahan Sukadamai	Koneksi baru Mainhole Jalan Baru ke Kel. Sukadamai dengan FO.
11	Kecamatan Bogor Tengah - Kelurahan Cibogor	Mengganti Radio 2.4 GHz dari link Kec. Bogor Tengah dengan FO
12	Balaikota - Wasbangkim	Mengganti Radio 5.8 GHz dari link Balaikota dengan FO
13	Wasbangkim - Kelurahan Pabaton	Mengganti Radio 2.4 GHz dari link Kel. Pasir Kuda dengan FO
14	Mainhole Bangbarung - Dinas Pendidikan	Mengganti Radio 5.8 GHz dari link Balaikota dengan FO
15	PD Pasar - DLLAJ	Mengganti Radio 5.8 GHz dari link PD Pasar dengan FO
16	Mainhole Jalan Baru - Kelurahan Kayumanis	
	- Kel. Kayumanis - Bina Marga	Merubah link FO dari Dispenda ke Mainhole Jalan Baru
	- Kel. Kayumanis - Satpol PP	Mengganti Radio 2.4 GHz dari link Dinas Pendidikan dengan FO
17	DLLAJ - Kelurahan Sindang Sari	Mengganti Radio 5.8 GHz dari link PD Pasar dengan FO

RINGKASAN RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMKOT BOGOR 2014 - 2018

4.4. Cetak Biru Aplikasi e-Government

Prioritas	Klaster	Perincian Modul	14	15	16	17	18
1	Kinerja PNS	mutasi dan bangrir,	✓				
		absensi dan penggajian,	✓				
		penilaian kinerja,		✓			
		diklat			✓		
2	Kinerja Pemerintahan	Website Pemko,	✓				
		e-Filling,				✓	
		Sistem evaluasi dan info hasil			✓		
		katalog barang daerah,			✓		
		pengelolaan pendapatan daerah,				✓	
		pengelolaan perusahaan daerah,					✓
		pemerintahan kelurahan dan kecamatan	✓				
3	Layanan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat,		✓			
		tataruang dan lingkungan hidup,			✓		
		kesehatan,	✓				
		pendidikan,	✓				
		ketenaga kerjaan,		✓			
		sosial dan kemiskinan,		✓			
		transportasi,			✓		
		jalan jembatan dan drainase,				✓	
		komunikasi,		✓			
		sampah dan limbah,					✓
		perumahan dan pemukiman,				✓	
		ruang terbuka hijau,					✓
		penerangan jalan umum,			✓		
		air bersih				✓	
4	Layanan Bisnis	Pajak dan Retribusi,		✓			

RINGKASAN RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMKOT BOGOR 2014 - 2018

	Pendaftaran dan perijinan,	✓				
	Bisnis dan Investasi,					✓
	Administrasi DPRD,					✓
	Sistem pemilu Daerah,					✓
	Katalog Hukum,					✓
	potensi daerah,				✓	
	pertanian perikanan peternakan,					✓
	pariwisata,			✓		
	KUKM,		✓			
	Industri perdagangan,				✓	
	bangunan dan gedung,					✓
Jumlah Modul Terbangun Setiap tahunnya		7	7	7	7	9

BAB 5. Penutup

Dokumen Rencana Induk e-Government Pemerintah Kota Bogor 2014 – 2018 ini merupakan buku induk akan tetapi bukan kitab suci yang tidak bisa disesuaikan dengan kondisinya sejalan dengan perkembangan politik, kondisi sosial kemasyarakatan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Sebaiknya dokumen ini ditinjau ulang setiap tahunnya oleh seluruh SKPD beserta kantor Kominfo sebagai leading sektornya. Apalagi didalam dokumen ini terdapat isu-isu sensitif yang beresiko munculnya resistensi dari komponen pemkot yang berkurang kenyamanan dan terpaksa harus berubah sejalan dengan kebijakan otomatisasi perkantoran.

Pengadaan perangkat komputer tidak serta merta menjadi solusi atas permasalahan peningkatan kinerja pemerintah, output dari pengadaan perangkat adalah berupa alat untuk pelaksanaan implementasi e-government sedangkan e-government itu sendiri merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronis, pemahaman ini harus dimiliki oleh seluruh pengelola pemerintah kabupaten sehingga beban kerja implementasi e-government bukan hanya oleh Kantor Kominfo akan tetapi merupakan gerakan bersama seluruh SKPD yang dipimpin langsung oleh Walikota untuk melaksanakannya. Kunci utama gerakan ini adalah perubahan paradikma dari kinerja berbasis manual menjadi kinerja berbasis elektronik.

Didalam bab cetak biru dan perencanaan tindak implementasi e-government telah disebutkan hasil dan cara mencapai hasil kegiatan pengembangan e-government ini, namun apabila pimpinan dan staf kurang memahaminya maka akan lebih baik jika kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini diteruskan dalam bentuk pendampingan implementasinya, lebih ideal lagi jika pihak pemerintah kota juga bekerjasama dengan perguruan tinggi terdekat di kota Bogor untuk mengawal suksesnya implementasi percepatan pengembangan e-government dan sesegera mungkin, membuka lowongan kerja bidang TIK untuk mengisi fungsi pengembangan TIK yang masih jauh dari memadai.

Seberapapun investasi dikucurkan untuk pengadaan teknologi informasi, tapi jika tidak didukung dengan SDM yang memadai serta kebijakan TIK yang masih lemah maka semua akan sia-sia saja karena perangkat TIK pastinya memiliki umur yang terbatas. Pemeliharaan perangkat TIK tanpa ilmu yang memadai akan menambah permasalahannya dan melenceng dari tujuan e-government sendiri yaitu efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah kota.